

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pertama kali terjadi di bulan Maret 2020 dan hal ini merupakan imbas dari mewabahnya penularan Covid-19 yang bermuasal dari kota Wuhan di Cina sejak bulan Desember 2019 (Dzulfaroh, 2020). Dampak yang diakibatkan dari pandemi ini bukan hanya terciptanya krisis kesehatan yang telah memperparah terjadinya krisis politik dan sosial, memperburuk ketimpangan yang ada dan secara tidak proporsional mempengaruhi segmen masyarakat yang paling rentan (Rose-Redwood et al., 2020) namun lebih dari itu menjalar hingga ke sektor perekonomian dengan cakupan nasional bahkan global (Yamali, 2020; Abdi, 2020; Pak et al., 2020).

Masifnya penyebaran virus ini bahkan memaksa organisasi kesehatan dunia, WHO, pada akhir Januari 2020 menetapkan virus corona ini sebagai Public Health Emergency of International Concern (Organization, n.d.) dan puncaknya pada tanggal 11 Maret 2020 diumumkan bahwa wabah ini sebagai Pandemic Global (Dong et al., 2020). International Monetary Fund (IMF) menetapkan tahun 2020 sebagai The Great Lockdown pada bulan April 2020 dan ekonomi dunia di tahun 2020 diprediksi lebih buruk dari The Great Depression 1929 dan Global Financial Crisis 2008 (Prayogo, 2020; McKibbin & Vines, 2020). Menurut catatan IMF kerugian yang ditimbulkan pandemi Covid-19 ini sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp 168.000 triliun

dengan kurs acuan Rp 14.000 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi – 4,4 % (Gopinath, 2020). Selain IMF lembaga dunialainnya turut memprediksikan pertumbuhan ekonomi yang negatif di antaranya Bank Dunia(*World Bank*) sebesar -5,2 % dan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) berkisar -7,6 % hingga -6 % (Prayogo, 2020).

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan Juli 2020 melakukan survei terhadap hampir 35.000 pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar(UMB) dan hasilnya adalah mayoritas pelaku UMK (84,2 %) dan UMB (82,29 %) sama-samamelaporkan penurunan pendapatan. Meski hampir semua sektor tertekan oleh pandemi Covid-19 sebagian perusahaan masih beroperasi seperti saat sebelum pandemi (BPS, 2020).

Tabel 1.1 Persentase operasional perusahaan berdasarkan sektor usaha.

No.	Sektor usaha	% Operasional perusahaan
1	Air & pengelolaan sampah	77,86%
2	Pertanian & peternakan	76,63%
3	Real estate	76,54%
4	Listrik & gas	76,35%
5	Perdagangan & reparasi kendaraan	69,06%
6	Pertambangan & penggalian	66,91%
7	Jasa keuangan	66,33%
8	Jasa kesehatan	64,53%

9	Jasa perusahaan	59,45%
10	Transportasi & pergudangan	58,75%

Sumber: (BPS, 2020)

Disebutkan pula bahwa penurunan operasional perusahaan tersebut mayoritas berupa pengurangan jam kerja karena hal demikian dinilai sebagai langkah terbaik yang relatif banyak diambil dibandingkan pilihan lain. Turunnya pendapatan perusahaan dikarenakan turunnya permintaan akibat pelanggan atau klien yang terkena Covid-19. Multiplier effect antar sektor usaha tentunya berakibat pula pada kewajiban perusahaan terhadap industri perbankan atau jasa keuangan lainnya. Relaksasi dan penjadwalan ulang kembali pembayaran pinjaman merupakan salah satu strategi yang diambil agar perusahaan masih tetap dapat beroperasi. Restrukturisasi kredit ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan karena sebelum pandemi pun pertumbuhan kredit hanya 6,04 % masih jauh dari yang diinginkan Bank Indonesia yaitu di atas 10 % (Kontan, 2020). Hingga September 2020 telah ada 100 bank yang merestrukturisasi kredit dengan nilai hampir Rp 360 triliun bagi debitur UMKM dan Rp 544,3 triliun bagi debitur non UMKM. Disayangkan kebijakan ini tidak bisa menekan NPL, terbukti di kuartal kedua tahun 2020 NPL telah berada di atas 3%. Bank tentunya melakukan screening untuk menyaring debitur mana yang layak mendapatkan restrukturisasi guna menghindari kerugian dan kenaikan NPL. Bila melihat demografi penyebaran jumlah kasus Covid-19 di 34 provinsi hingga akhir triwulan III (September 2020) maka hampir 60% kasus terjadi di

pulau Jawa yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten (Tribunnews, 2020). Tabel 1.2 berikut menunjukkan akumulasi kasus Covid-19 berdasarkan provinsi per akhir September 2020.

Tabel 1.2 Akumulasi kasus Covid-19 berdasarkan provinsi per akhir September 2020

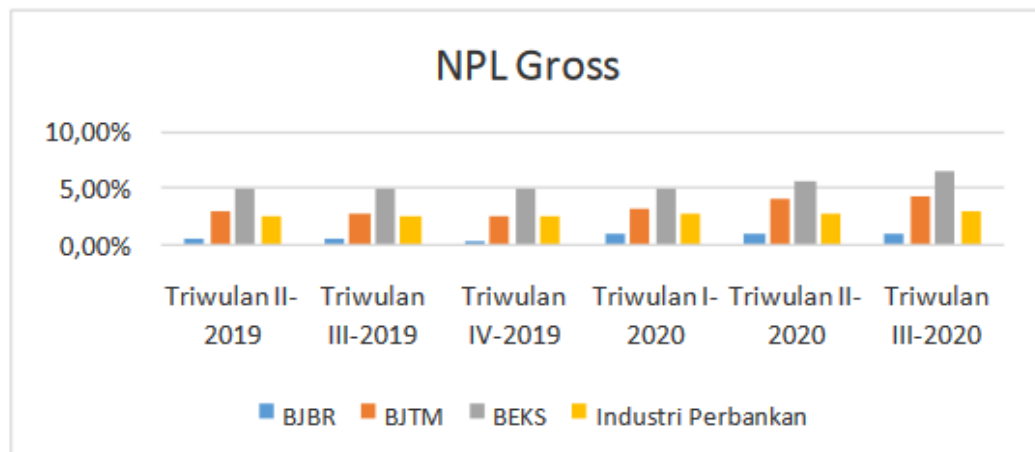
No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Persentase
1	DKI Jakarta	67.902	25%
2	Jawa Timur	42.391	16%
3	Jawa Tengah	21.004	8%
4	Jawa Barat	20.131	7%
5	Sulawesi Selatan	14.982	6%
6	Kalimantan Selatan	10.080	4%
7	Sumatera Utara	9.843	4%
8	Bali	8.389	3%
9	Kalimantan Timur	7.891	3%
10	Riau	6.315	2%
11	Papua	5.763	2%
12	Sumatera Selatan	5.734	2%
13	Sumatera Barat	5.363	2%
14	Banten	5.050	2%
15	Sulawesi Utara	4.390	2%
16	19 Provinsi lainnya	36.111	13%

Dengan mayoritas kasus terbanyak terjadi di pulau Jawa maka berimbas pula pada iklim usaha di provinsi-provinsi tersebut yang turut juga berdampak pada kewajiban pelaku UMK dan UMB terhadap lembaga perbankan. Menurunnya pendapatan hampir di semua lini usaha turut terciptanya gejala di sektor perbankan baik bank pemerintah pusat, bank pemerintah daerah, dan juga bank swasta nasional terutama dari segi pembiayaan dan penghimpunan dana (Ningsih & Mahfudz, 2020).

Sejumlah bank pemerintah daerah yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) maupun yang belum terdaftar di BEI juga mengalami gejala tersebut hal ini terlihat dari rasio NPL yang cenderung bertambah dengan rata-rata di atas NPL industri perbankan. Tabel 1.3 menunjukkan rasio NPL Gross pada Bank Jawa Barat (BJBR), Bank Jawa Timur (BJTM), dan Bank Banten (BEKS) terhadap rasio NPL industri perbankan. Data diambil dan diolah dari laporan keuangan masing-masing bank daerah di laman Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu tiga triwulan sebelum pandemi dan tiga triwulan saat pandemi Covid-19. BJTM dan BEKS menunjukkan rasio NPL di atas rasio NPL industri perbankan dan hanya BJBR yang rasio NPL-nya di bawah NPL industri perbankan

1.3 Tabel NPL Bank Jawa Barat, Bank Jawa Timur dan Bank Banten

Periode	NPL Gross			
	BJBR	BJTM	BEKS	Industri Perbankan
Triwulan II-2019	0,71%	3,16%	5,02%	2,56%
Triwulan III-2019	0,64%	2,89%	5,03%	2,59%
Triwulan IV-2019	0,51%	2,77%	5,01%	2,68%
Triwulan I-2020	1,19%	3,35%	5,04%	2,78%
Triwulan II-2020	1,21%	4,27%	5,69%	3,00%
Triwulan III-2020	1,15%	4,49%	6,66%	3,19%



Pada Gambar di atas terlihat bahwa NPL BEKS lebih besar daripada NPL BJBR dan NPL BJTM bahkan melampaui NPL rata-rata industri perbankan. Ini menunjukkan bahwa terjadi gejolak pada sejumlah bank daerah terutama dari sisi rasio NPL sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Dengan perkembangan perbankan di Indonesia sudah tercatat terdapat 27 bank pembangunan daerah yang tersebar di masing-masing provinsi diseluruh Indonesia. Dari 27 bank pembangunan daerah yang ada di Indonesia, hingga saat ini hanya ada 3 bank pembangunan daerah yang sudah tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *go public* yaitu PT Bank Pembangunan Jawa Barat Tbk (BJB), PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Oktaviani, 2018).

Tahun 2020 Biro Riset Infobank melakukan riset tentang “Rating BUMD 2020” atas kinerja keuangan BUMD tahun 2020. Untuk BUMD berbentuk BPD, laporan keuangannya menggunakan data hingga periode Desember 2020. Sementara, BUMD berbentuk BPR/BPRS menggunakan laporan keuangan per September 2020 atau triwulan ketiga. Ada lima tahapan yang dilakukan Biro Riset Infobank dalam proses penilaian terhadap BUMD tersebut. Pertama, menentukan formula rating yang didasarkan pada perkembangan perbankan dan kebijakan regulator serta pencapaian perbankan secara industri. Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, mengolah angka-angka dengan berbagai rasio dan pertumbuhan yang sudah ditetapkan. Keempat, memberikan notasi akhir untuk pemberian predikat. Dan kelima, mengelompokkan BUMD sesuai dengan besaran modal inti dan aset. Dalam

riset tersebut, Bank Jatim dan Bank Jateng meraih predikat BPD terbaik dengan kategori modal inti Rp 5 triliun sampai dengan dibawah rp30 triliun (BUKU 3) dengan total aset antara Rp 50 triliun sampai dengan Rp 100 triliun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Efisiensi, Kualitas Aset dan Stabilitas Bank Pembangunan Daerah. Studi Kasus : Bank Jatim dan Bank Jateng Tahun 2016-2021”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan tingkat efisiensi bank pembangunan daerah Bank Jatim dan Bank Jateng?
2. Bagaimana perbedaan kualitas aset bank pembangunan daerah Bank Jatim dan Bank Jateng?
3. Bagaimana perbedaan tingkat stabilitas bank pembangunan daerah Bank Jatim dan Bank Jateng?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diuraikan tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbedaan tingkat efisiensi bank pembangunan daerah Bank Jatim dan Bank Jateng.

2. Mengetahui perbedaan kualitas aset bank pembangunan daerah Bank Jatim dan Bank Jateng.
3. Mengetahui perbedaan tingkat stabilitas bank pembangunan daerah Bank Jatim dan Bank Jateng.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai perbedaan bank pembangunan daerah Bank Jatim dan Bank Jateng dari segi efisiensi, kualitas aset dan stabilitas bank, guna memberi masukan dalam mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan agar lebih stabil dan untuk mengetahui apakah Bank Jatim dan Bank Jateng telah mengelola asetnya secara efisien. Selain itu diharapkan penelitian ini mampu menambah referensi penelitian terkait efisiensi, kualitas aset dan stabilitas bank pembangunan daerah khususnya di Indonesia.

1.5 Sistematika Tesis

Penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan memaparkan latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab 2 Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan studi empiris hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, serta kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

Bab 3 Metode penelitian berisi jenis penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab 4 Hasil dan pembahasan menyajikan rangkuman hasil pengolahan data, analisis deskriptif dan inferensia.

Bab 5 Kesimpulan berisi pokok hasil penelitian, saran terkait penelitian, serta keterbatasan penelitian.